

ABSTRAK

Di banyak negara dewasa ini penjualan secara lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang secara efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional, di Indonesia lelang telah diatur sejak tahun 1908 yaitu dengan diberlakukannya *Vendu Reglement* (peraturan lelang, stbl 1908 dan *venu instruksi lelang*, stbl 1908 no 190) Dalam suatu lelang terdapat legalitas formal subjek dan objek lelang yang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang / penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang / penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang. Maka dari itu dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab pejabat lelang apabila dia tidak menerapkan prinsip kecermatan dan mendasarkan lelang pada dokumen lelang yang tidak sah

Sebagaimana disebutkan pada pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dimana pejabat lelang berkewajiban meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang sangat diperlukan baik dari sisi pejabat lelang sendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentingan. Sasaran dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui Keabsahan dari lelang yang didasarkan pada dokumen lelang yang tidak sah dan Tanggung jawab dari pejabat lelang apabila dia tidak cermat dan mendasarkan lelang pada dokumen lelang yang tidak sah tersebut., apa akibat hukumnya bagi lelang yang sudah dilaksanakan.

Kata kunci : lelang, pejabat lelang

ABSTRACT

Recently, auction has become one of effective and efficient alternative types of selling goods that is managed professionally in many countries. In Indonesia, auction has been regulated since 1908 with the application of Verdu Reglement (Auction regulation, stbl 1908 and Verdu auction instructions stbl 1908 number 190). Auction has a legal formal subject and the object of an auction. It is a condition in which the auction requirement documents have been fulfilled by the sellers, providing complete data to show the legal relationship between the sellers (the auction subject) and the object of auction to convince the auctioneers that the sellers have the right to sell the object and that the object can be sold. To do so, the writer focuses on the discussion of the responsibility of the auction authority when he/she fails applying the principles of accuracy and to base the auction upon the illegal auction documents.

As written on the clause number 13 of the Regulations of the Ministry of Finance Affairs number 158/PMK.06/2013 regarding the Changes of the Regulations of the Ministry of Finance Affairs number 174/PMK.06/2010 regarding the Class I Auction Authority, it is stated that the auction authority is obliged to examine the formal legality of the subject and the auction object. Thus, the responsibility of the auction authority, which includes the validity of the auction documents, is essential. The responsibility comprises those from the auction authority, other related parties and the third party. The focus of the thesis is to evaluate the validity of the auction, which is based on the illegal auction documents and the responsibility of the auction authority when he/she fails acting carefully and referring the auction on such document, as well as the legal impact on the auction having been conducting.